OMBUDSMAN TINJAU KONDISI PELAYANAN DI ROHIL, PASCA RUMAHKAN HONORER

Jum'at, 26 Oktober 2018 - Zsa Zsa Bangun Pratama

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Ahmad Fitri mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mampu optimalkan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang ada dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Optimalisasi kinerja ini penting dilakukan agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tidak terhambat.

Harapan ini dikemukakan Ahmad Fitri menyikapi kebijakan Pemda Rohil yang telah merumahkan sementara sekitar lebih 2.000 pegawai honor yang bertugas di lingkup Pemda Rohil.

Harapan ini juga sudah disampaikan langsung setelah Ombudsman RI Provinsi Riau melihat langsung kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di ibu kota Rohil, Bagansiapi-api, Rabu (24/10) lalu.

Saat melakukan kunjungan lapangan di Rohil, Ombudsman RI Provinsi Riau meninjau langsung kondisi penyelenggaraan pelayanan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dari peninjauan lapangan tersebut Ombudsman melihat masih ada masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pelayanan yang diberikan OPD tersebut, "ujar Ahmad Fitri kepada Tribunpekanbaru.com.

Ombudsman juga mengamati bagaimana kinerja PNS di OPD tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi di lapangan ini turut disampaikan Ahmad Fitri saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemda Rohil di kantor bupati Rohil pada hari itu.

Pertemuan yang dipimpin Sekda Rohil turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Sekretaris Inspektorat dan Sekretaris BPKAD Rohil.

Pada pertemuan itu Ahmad turut menyampaikan harapan kepada Pemda Rohil agar penyelenggaraan pelayanan publik bisa dilaksanakan dengan baik pasca dirumahkannya tenaga honorer.

"Ombudsman juga mendapatkan informasi di lapangan jika selama ini penyelenggaraan pelayanan publik di Rohil juga banyak didukung oleh tugas-tugas dari pegawai honorer, "jelasnya.

Dari pertemuan dengan jajaran Pemda Rohil Ombudsman mendapatkan penjelasan dan informasi terkait mengapa

Pemda Rohil merumahkan sementara lebih 2.000 pegawai honor.

Pada pertemuan itu, kata Ahmad, Pemda Rohil melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mengutarakan bahwa terkait persoalan dirumahkannya pegawai honor ini akan diambil langkah untuk merekrut kembali pegawai honorer yang telah dirumahkan melalui proses seleksi.

Selanjutnya berapa jumlah pegawai honor yang akan diterima dari seleksi tersebut akan bergantung dari kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD di lingkup Pemda Rohil. (*)